



Pelajar Pelaku Vandalisme Dapat Sanksi Hukum

JOGJA--Vandalisme yang marak terjadi di Yogyakarta sudah cukup mengkhawatirkan. Banyak bangunan, termasuk bangunan dan situs sejarah yang dicorat-coret para pelaku vandalisme yang sebagian merupakan pelajar.

Persoalan ini membuat masyarakat Yogyakarta menjadi tidak nyaman dengan lingkungan di kota pelajar ini. Sebab coretan-coretan itu membuat kesan kumuh dan kotor serta merusak estetika kota.

"Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya konkrit untuk menekan kegiatan vandalisme yang kebanyakan dilakukan oleh para pelajar," ujar Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (satpol) PP Kota Jogja, Budi Santoso dalam dialog budaya bertema 'Mural dan Vandalisme' yang digelar

Dewan Kebudayaan Kota Jogja di Hotel Ruba Grha, Senin (3/11).

Menurut Budi, pemerintah dengan tegas memberlakukan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2002 yang akan memberikan sanksi hukum kepada semua pihak, termasuk para pelajar bila melakukan aksi vandalisme. Sanksi hukum yang diberikan berupa kurungan dan denda sebesar Rp 20 juta.

Sanksi tersebut akan diberlakukan sama terhadap para pelajar. Namun bila pelajar tersebut usianya di bawah 17 tahun maka akan dibentuk peradilan anak. "Pemerintah telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelaku vandalisme tersebut," ujarnya.

Dijelaskan Budi, pihaknya selaku pengaman Perda melakukan edukasi

kepada semua pelajar melalui jajaran Dinas Pendidikan terkait informasi tentang vandalisme. "Selain itu berbagai kegiatan yang dirancang bersama berbagai komunitas pelajar untuk secara bersama-sama memerangi vandalisme," jelasnya.

Sementara Dosen Fakultas Seni Rupa Desain ISI Yogyakarta, Sumbo Tinarbuko mengungkapkan, pemerintah setempat perlu mewaspadai munculnya vandalisme berbayar. Sebab vandalisme tidak sekedar mencoret-coret dinding semata tetapi juga berbagai bentuk iklan yang bertebaran di seantero kota yang menghasilkan sampah visual.

Persoalan itu terjadi karena muncul dilema antara kebutuhan penataan kota yang baik dengan kegiatan periklanan yang ditengarai semakin

lama semakin membuat semrawut keadaan kota.

"Vandalisme berbayar ini juga bentuk vandalisme jika diartikan sebagai sebuah kegiatan yang merusak. Karena itu vandalisme berbayar juga perlu diwaspadai," tandasnya.

Hal senada juga diungkap Ketua Dewan Kebudayaan Kota Jogja, Charis Zubair yang mengemukakan Jogja sebagai kota budaya hendaknya menyesuaikan tata kota yang menunjukkan sebagai kota budaya. Sebab penataan ruang publik yang semrawut dan tata kota yang tampak kurang terkoordinasi bukanlah menunjukkan sebagai kota budaya.

"Karena itu dipertlukan perencanaan yang matang dalam menata kota, terutama kota yang berpredikat kota budaya," tuturnya. (dwi)

	Instansi	
1.		indak Lanjut
2.		tut Ditanggapi
		tut Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005